

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP IMPOR BARANG BENANG KAPAS**

**27 (DUA PULUH TUJUH) NOMOR *HARMONIZED SYSTEM*
(NO HS) 8-DIGIT**

BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA 2022

VERSI TIDAK RAHASIA

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
(KPPI)
2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
A. PENDAHULUAN.....	5
A.1. Latar Belakang.....	5
A.2. Identitas Pemohon	6
A.3. Proporsi yang Besar	6
A.4. Periode Penyelidikan.....	6
A.5. Prosedur dan Notifikasi	6
A.6. Dengar Pendapat.....	7
B. PENYELIDIKAN	8
B.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing.....	8
B.2. Benang Kapas Yang Diproduksi Pemohon.....	8
B.3. Barang Impor	11
B.4. Kesimpulan Pembuktian Barang Yang Diselidiki	12
B.5. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki	12
B.5.1. Lonjakan Jumlah Impor Secara Absolut	12
B.5.2. Lonjakan Jumlah Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional ...	13
B.5.3. Perkembangan Tidak Terduga	14
B.5.4. Efek Kewajiban Penurunan Konsesi Tarif GATT 1994	16
B.6. Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius	16
B.6.1. Kinerja Pemohon.....	16
Penjualan Domestik dan Produksi	16
Produksi, Kapasitas Terpasang, dan Kapasitas Terpakai.....	17
Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/Kerugian	17
Penjualan Domestik dan Keuntungan/ Kerugian	18
Analisa Efek Volume.....	18
B.6.2. Faktor Lain.....	19
B.7. Hubungan Sebab-Akibat.....	19
C. REKOMENDASI	20
D. PENYESUAIAN STRUKTURAL	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 27 Nomor HS 8-Digit Benang Kapas Yang Diselidiki KPPI	5
Tabel 2. Proporsi Produksi Tahun 2024	6
Tabel 3. 27 Nomor HS 8-Digit Benang Kapas Yang Diselidiki KPPI	12
Tabel 4. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut.....	12
Tabel 5. Impor Relatif Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Dibandingkan Dengan Produksi Nasional	13
Tabel 6. Pangsa Pasar Negara Asal Impor.....	13
Tabel 7. Negara Asal Impor Benang Kapas di Indonesia pada periode 2019-2024	14
Tabel 8. Data Ekspor Benang Kapas Dari RRT	16
Tabel 9. Penjualan Domestik, Produksi, dan Persediaan Akhir	16
Tabel 10. Produksi, Kapasitas Terpasang, dan Kapasitas Terpakai	17
Tabel 11. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/Kerugian	17
Tabel 12. Penjualan Domestik dan Keuntungan/ Kerugian	18
Tabel 13. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik IDN, Pangsa Pasar Impor, dan Pangsa Pasar IDN.....	18
Tabel 14. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional.....	19
Tabel 15. 27 Nomor HS 8-Digit Benang Kapas yang Direkomendasikan.....	20
Tabel 16. Rekomendasi Pengenaan BMTP	21
Tabel 17. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP	22
Tabel 18. Realisasi Penyesuaian Struktural	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Proses Produksi Benang Kapas	9
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Produsen yang Diwakili Pemohon	26
Lampiran 2. Uraian Nomor HS Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan TPP	27

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dapat menyelesaikan penyelidikan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap barang impor Benang dari Kapas dalam rangka pemulihan dan pencegahan atas kerugian / ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri (IDN) akibat dari terjadinya lonjakan jumlah barang impor, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34 Tahun 2011).

Tujuan dari penyelidikan yang dilakukan adalah untuk membuktikan bahwa kerugian serius / ancaman kerugian serius yang dialami oleh IDN merupakan akibat dari terjadinya lonjakan jumlah barang impor sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) PP 34 Tahun 2011.

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak DR. Budi Susanto, M.Si. selaku Menteri Perdagangan atas dukungan yang diberikan kepada KPPI dalam melaksanakan penyelidikan, dan juga kepada Kementerian/Lembaga, IDN, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk dukungan yang diberikan selama penyelidikan dilaksanakan.

Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Akhir penyelidikan pengenaan Tindakan Pengamanan terhadap barang impor Benang dari Kapas ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan khususnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada Industri Dalam Negeri Indonesia.

Jakarta, Mei 2025

Julia Gustaria Silalahi
Ketua KPPI

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 18 September 2023, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerima Permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon yang mewakili 15 (lima belas) perusahaan, untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang “Benang Kapas” yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Nomor *Harmonized System* (HS) 8-digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri (IDN), sebagai berikut:

Tabel 1. 27 Nomor HS 8-Digit Benang Kapas Yang Diselidiki KPPI

No	Nomor HS	No	Nomor HS
1.	5204.11.10	15.	5205.48.00
2.	5204.19.00	16.	5206.11.00
3.	5204.20.00	17.	5206.12.00
4.	5205.11.00	18.	5206.14.00
5.	5205.12.00	19.	5206.21.00
6.	5205.21.00	20.	5206.23.00
7.	5205.22.00	21.	5206.24.00
8.	5205.24.00	22.	5206.25.00
9.	5205.26.00	23.	5206.31.00
10.	5205.32.00	24.	5206.32.00
11.	5205.41.00	25.	5206.33.00
12.	5205.42.00	26.	5206.42.00
13.	5205.43.00	27.	5206.45.00
14.	5205.47.00		

Sumber: BTKI 2022

2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) KPPI melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan TPP terhadap impor Benang Kapas. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, terdapat indikasi lonjakan jumlah impor barang dimaksud, serta Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang.
3. Sehubungan dengan poin 2 dan berdasarkan PP 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan TPP terhadap impor barang benang kapas pada tanggal 27 Oktober 2023, yang langsung diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia dan *website* Kementerian Perdagangan pada hari yang sama.

A.2. Identitas Pemohon

4. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia
 Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt.16
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.56, Jakarta Selatan
 Telp./Faks. : (021) 5272171 / 021-5272166
 E-mail : secretariat@bpnapi.org
 Contact Person : Andrew Purnama
 Jabatan : Sekretariat Jenderal API

A.3. Proporsi yang Besar

5. Sesuai Pasal 1 Angka 18 PP 34/2011, proporsi produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar yaitu sebesar 61% dari keseluruhan produksi nasional pada tahun 2024, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili IDN, seperti terlihat dalam tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Proporsi Produksi Tahun 2024

Uraian	Proporsi (%)
Produksi Pemohon	61
Produksi Non Pemohon	39
Produksi Nasional	100

Sumber: Pemohon dan Hasil Verifikasi

6. Berdasarkan Tabel 2 di atas, Proporsi produksi Pemohon adalah sebesar 61% dan proporsi produksi Non Pemohon adalah sebesar 39% dari total produksi nasional. Dengan demikian Pemohon dinyatakan sudah memenuhi persyaratan *major proportion* sesuai *Article 4.1(c) Agreement on Safeguards* (AoS) dan Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) untuk mewakili IDN.

A.4. Periode Penyelidikan

7. Periode Penyelidikan data yang mengalami lonjakan jumlah impor yang diklaim oleh Pemohon adalah 2019-2022 (selama 4 tahun) selanjutnya pemutakhiran data dilakukan oleh KPPI dalam periode 2021-2024.

A.5. Prosedur dan Notifikasi

8. Sesuai Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 27 Oktober 2023, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
9. Sesuai *Article 12.1(a)* dalam WTO AoS, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 27 Oktober 2023 mengenai dimulainya penyelidikan. Pada tanggal 1 November 2023, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/43.

10. Sesuai Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011 dan *Article 3* WTO AoS, tanggal 28 November 2023 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada PYB menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan TPP atas impor barang Benang Kapas. Terdapat sejumlah 41 (empat puluh satu) orang yang hadir dalam dengar pendapat tersebut terdiri dari 6 (enam) orang perwakilan Pemerintah negara asal impor, 1 (satu) orang perwakilan asosiasi eksportir, 2 (dua) orang perwakilan asosiasi importir, 24 (dua puluh empat) orang perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, dan 8 (delapan) orang dari perwakilan Pemohon dan perusahaan anggota Pemohon.
11. Sesuai Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011, tanggal 19 Januari 2024 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada perusahaan anggota Pemohon dan jawaban kuesioner telah dikembalikan kepada KPPI secara bertahap tanggal 19 Februari 2024 s.d. 6 Juni 2024 disertai dengan bukti pendukungnya.
12. Dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi yang terdapat dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon tanggal 11-14 Juni 2024 KPPI melakukan verifikasi lapangan terhadap perusahaan Pemohon di Surakarta, Jawa Tengah.
13. Tanggal 5 Juli 2024 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon (API) terkait konsolidasi data perusahaan dan data-data nasional. Selanjutnya, tanggal 1 Oktober 2024 API mengembalikan Jawaban Kuesioner tersebut kepada KPPI.
14. Sehubungan dengan poin 7, tanggal 17 Januari 2025 KPPI meminta pemutakhiran data periode penyelidikan Januari-Desember tahun 2024 secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon dan telah dikembalikan kepada KPPI tanggal 27 Februari 2025.

A.6. Dengar Pendapat

15. Dengar pendapat diselenggarakan tanggal 28 November 2023 di Ruang Anggrek Lantai 12, Kementerian Perdagangan dihadiri oleh 41 (empat puluh satu) orang, terdiri dari 6 (enam) orang perwakilan Pemerintah negara eksportir, 1 (satu) orang perwakilan asosiasi eksportir, 2 (dua) orang perwakilan asosiasi importir, 24 (dua puluh empat) orang perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, 8 (delapan) orang dari perwakilan Pemohon dan perusahaan anggota Pemohon. Kegiatan dengar pendapat ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada Pihak Yang Berkepentingan (PYB) guna menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan TPP atas impor barang Benang Kapas.

B. PENYELIDIKAN

B.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

16. Dalam rangka melakukan pembuktian apakah Barang Yang Diselidiki merupakan Barang Sejenis atau Secara Langsung Bersaing dengan Benang Kapas yang diproduksi Pemohon, KPPI telah meminta bukti data dan informasi melalui pengiriman kuesioner dan verifikasi lapangan ke Pemohon. Selain itu, KPPI juga mendapatkan bukti data dan informasi dari Importir benang kapas mengenai spesifikasi barang yang diimpor.

B.2. Benang Kapas Yang Diproduksi Pemohon

17. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari benang kapas yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik Fisik

Barang produksi Pemohon memiliki karakteristik fisik sebagai berikut:

- 1) Benang jahit dari kapas adalah benang rangkap (dilipat) atau benang kabel dari serat kapas yang digulung pada *reels* atau *tubes* dengan berat tidak melebihi 1.000 gram, diberi *finishing treatment* untuk tujuan menjahit dan dengan antihan "Z", terdiri dari:
 - a) Benang jahit dari kapas, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
 - b) Benang jahit dari kapas, disiapkan untuk penjualan eceran (benang tunggal, rangkap (dilipat) atau kabel yang digulung pada alat gulungan benang).
- 2) Benang kapas (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, terdiri dari:
 - a) Benang tunggal adalah benang yang tersusun dari satu filamen (monofilamen), atau dua/lebih benang filamen (multifilamen), digabung menjadi satu dengan antihan (*twisted*) atau tanpa antihan (*untwisted*).



- b) Benang rangkap (dilipat) adalah benang yang dibentuk dari dua atau lebih benang tunggal, termasuk yang diperoleh dari monofilamen (benang *twofold*, *threefold*, *fourfold*, dst) dipilin bersama-sama (*twisted together*) dalam satu proses pilinan. Meskipun demikian, benang monofilamen yang digabung tersendiri dengan antihan (*twisted*) tidak termasuk sebagai benang rangkap (dilipat).



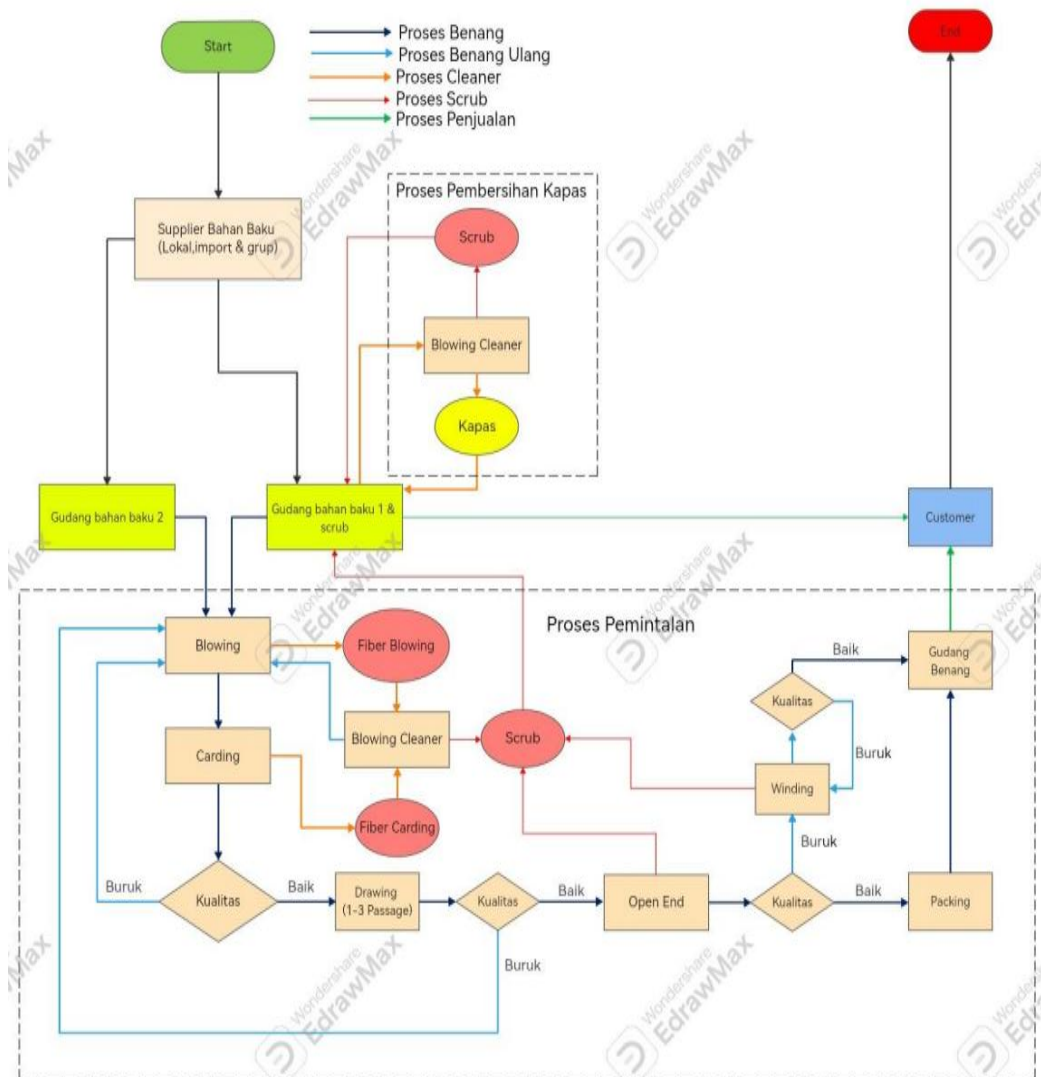
- c) Benang kabel adalah benang yang dibentuk dari dua benang atau lebih, yang salah satunya adalah benang rangkap (dilipat), dipilin (*twisted*) bersama-sama dalam satu lipatan atau lebih.



Alur Proses Produksi

Alur proses produksi Benang Kapas sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Proses Produksi Benang Kapas



Sumber: Pemohon

Keterangan Alur Proses Produksi:1. Proses *Blowing*

- Mencampur serat.
- Membuka gumpalan serat.
- Membersihkan kotoran.
- Membuat gulungan lap.

2. Proses *Carding*

- Membuka gumpalan serat lebih lanjut, sehingga seratnya terurai satu sama lain.
- Membersihkan kotoran yang masih ada di dalam gumpalan serat atau yang tersangkut.
- Memisahkan serat yang sangat pendek dari serat panjang (*main fibre*).
- Membentuk serat tersebut menjadi *sliver*.

3. Proses *Drawing*

- Meluruskan dan mensejajarkan serat dalam *sliver* ke arah sumbu dari *sliver*.
- Memperbaiki kerataan berat persatuan panjang, campuran atau sifat lainnya dengan jalan perangkapan.
- Menyesuaikan berat *sliver* persatuan panjang dengan keperluan pada proses berikutnya.

4. Proses *Open End*

- *Drafting* (peregangan), proses peregangan *sliver* yang masuk dengan cara diurai dengan putaran comber.
- *Twisting* (pemberi antihan), merupakan syarat penting dalam pembuatan benang. Tujuannya adalah memberi sejumlah antihan pada benang sesuai dengan nomer benang yang dipintal.
- *Winding* (penggulung), proses pembentukan gulungan benang

5. Proses *Winding*

Memperbaiki kualitas benang pada gulungan.

6. Proses *Packing*

Memberi kemasan pada *cones* benang agar kualitas benang tetap terjaga.

Bahan Baku

Barang Produksi Pemohon memiliki bahan baku yang sama dengan barang impor, yaitu:

- 1) Bahan baku benang jahit dari kapas adalah benang tunggal dari kapas, termasuk yang diperoleh dari monofilamen (benang *twofold*, *threefold*, *fourfold*, dst) dan diberi *finishing treatment*.

2) Bahan baku benang kapas (selain benang jahit) adalah:

- a) Serat tidak disisir (*carded*): tujuan utama dari *carding* adalah memisahkan serat kapas, meletakkan serat kurang lebih sejajar, dan membersihkan serat dari kandungan selain serat kapas untuk sebagian besar atau keseluruhan serat.
- b) Serat disisir (*combed*) adalah proses membersihkan serat tidak disisir dari sisa-sisa kandungan di luar serat dan menghilangkan serat pendek, sehingga hanya tersisa serat panjang dari serat kapas yang diletakkan sejajar.

Kegunaan

Barang Produksi Pemohon memiliki kegunaan yang sama dengan barang impor, yaitu:

- 1) kegunaan benang jahit dari kapas adalah untuk menjahit.
- 2) kegunaan benang kapas (selain benang jahit) adalah untuk ditenun atau dirajut menjadi kain.

B.3. Barang Impor

18. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI tahun 2022.
19. Nomor *Harmonized System* (HS) barang impor Benang Kapas yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022 adalah:
20. Karakteristik, Bahan Baku, Standarisasi, dan Kegunaan dari Barang Impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor Benang Kapas sama dengan karakteristik yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada poin 17.

Bahan Baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada poin 17.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu seperti yang tertera pada poin 17.

B.4. Kesimpulan Pembuktian Barang Yang Diselidiki

21. Berdasarkan penjelasan poin 17-20, dapat disimpulkan bahwa barang impor “Benang Kapas dengan 27 nomor HS 8-digit sesuai dengan BTKI tahun 2022 merupakan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, dan kegunaan, sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Nomor HS 8-Digit Benang Kapas Yang Diselidiki KPPI

No	Nomor HS	No	Nomor HS
1.	5204.11.10	15.	5205.48.00
2.	5204.19.00	16.	5206.11.00
3.	5204.20.00	17.	5206.12.00
4.	5205.11.00	18.	5206.14.00
5.	5205.12.00	19.	5206.21.00
6.	5205.21.00	20.	5206.23.00
7.	5205.22.00	21.	5206.24.00
8.	5205.24.00	22.	5206.25.00
9.	5205.26.00	23.	5206.31.00
10.	5205.32.00	24.	5206.32.00
11.	5205.41.00	25.	5206.33.00
12.	5205.42.00	26.	5206.42.00
13.	5205.43.00	27.	5206.45.00
14.	5205.47.00		

Sumber: BTKI 2022

B.5. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

B.5.1. Lonjakan Jumlah Impor Secara Absolut

Tabel 4. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Deskripsi	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren (%)
	2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Jumlah Impor (Ton)	20.873	29.908	26.073	27.631	43,28	(12,82)	5,98	7,30

Sumber: Pusat Data Sistem Informasi (PDSI) Kemendag, BPS, diolah.

22. Jumlah impor secara absolut periode 2021-2024 mengalami tren peningkatan sebesar 7,30%. Pada tahun 2021 jumlah impor sebesar 20.873 Ton naik menjadi 29.908 Ton pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 43,28%. Kemudian ditahun 2023 jumlah impor mengalami penurunan menjadi 26.073 Ton atau sebesar 12,82%, dan selanjutnya tahun 2024 jumlah impor mengalami peningkatan kembali menjadi 27.631 Ton atau sebesar 5,98%.

B.5.2. Lonjakan Jumlah Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Tabel 5. Impor Relatif Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Dibandingkan Dengan Produksi Nasional

Deskripsi	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren (%)
	2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Jumlah Impor (Ton)	20.873	29.908	26.073	27.631	43,28	(12,82)	5,98	7,30
Produksi Nasional (Indeks)	100	117,13	71,01	67,88	17,13	(39,37)	(4,41)	(15,32)
Impor Relatif (Indeks)	100	122,33	175,90	195,01	22,33	43,79	10,87	26,70

Sumber: PDSI Kemendag, BPS, Hasil verifikasi KPPI, diolah.

23. Sebagaimana Tabel 5 di atas, jumlah impor secara relatif terhadap produksi nasional pada periode 2021-2024 mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 26,70%. Hal ini disebabkan karena di saat impor mengalami peningkatan, produksi IDN terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 impor relatif sebesar 100 poin indeks naik menjadi 122,33 poin indeks pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 impor relatif mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 175,90 poin indeks, kemudian pada tahun 2024 jumlah impor kembali meningkat menjadi 195,01 poin indeks.

Tabel 6. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

No. Urut	Negara Asal Impor	2024	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Viet Nam	11.866	42,94
2	Rep. Rakyat Tiongkok	7.428	26,88
3	India	3.276	11,85
4	Taiwan	2.171	7,86
5	Malaysia	1.146	4,15
6	Turkiye	947	3,43
7	Negara Lainnya	798	2,89
	Dunia	27.631	100

Sumber: PDSI Kemendag, BPS, diolah.

24. Berdasarkan Tabel 6 di atas, negara asal impor terbesar pada tahun 2024 adalah Viet Nam dengan pangsa 42,94%, diikuti oleh Rep. Rakyat Tiongkok (RRT) dengan pangsa 26,88%, India dengan pangsa 11,85%, Taiwan dengan pangsa 7,86%, Malaysia dengan pangsa 4,15%, Turkiye dengan pangsa 3,43%, dan Negara Lainnya (a.l. Korea Selatan, Pakistan, dan Thailand), dengan pangsa 2,89%.

B.5.3. Perkembangan Tidak Terduga

25. Terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh Pandemi Covid-19, perang dagang AS-RRT, pembatasan ekspor kapas di India, serta pengalihan tujuan ekspor RRT dari AS ke Indonesia.

26. Disrupsi Rantai Pasok Akibat Pandemi COVID-19

Pandemi menyebabkan pembatasan besar-besaran di Indonesia. Banyak produsen benang kapas di Indonesia yang ditutup sementara sehingga terjadi penurunan jumlah produksi dan pengurangan jumlah tenaga kerja. Situasi ini membuka peluang bagi negara-negara lain untuk memasok benang kapas ke pasar yang besar seperti Indonesia, yang saat itu terpaksa melakukan pembatasan.

Vietnam merupakan salah satu negara yang berhasil mengendalikan gelombang awal pandemi (terutama 2020–2021). Banyak pabrik di Vietnam yang tetap beroperasi bahkan ekspor benang kapas dari Vietnam ke Indonesia terus meningkat secara signifikan sejak terjadinya pandemik.¹ Sedangkan IDN masih dalam proses penanganan Covid-19 dan kebutuhan kapas cukup tinggi untuk produksi Alat Pelindung Diri (APD). Hal ini menyebabkan terjadinya lonjakan impor benang kapas asal Vietnam secara tidak terduga di Indonesia. Sebelumnya, tahun 2019 dan 2020 porsi terbesar pangsa impor benang kapas berasal dari RRT, namun sejak tahun 2021 hingga 2024 pangsa impor benang kapas di Indonesia dikuasai oleh Vietnam.

Tabel 7. Negara Asal Impor Benang Kapas di Indonesia pada periode 2019-2024

Negara Asal Impor	Berat: Ton					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vietnam	5.307	3.670	9.574	13.652	12.587	11.866
Rep. Rakyat Tiongkok	5.633	4.554	5.569	8.314	6.907	7.428
India	1.628	1.736	1.887	2.452	3.221	3.276
Taiwan	290	47	218	125	65	2.171
Malaysia	78	343	94	47	204	1.146

Sumber: PDSI Kemendag, BPS, diolah

¹ *Foreign Agricultural Service*. (5 April 2022). *Cotton and Products Annual: Vietnam* (GAIN Report No. VM2022-0021). *United States Department of Agriculture*.

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Cotton%20and%20Products%20Annual_Hanoi_Vietnam_VM2022-0021.pdf

27. Perpindahan Fasilitas Produksi Benang Kapas Akibat Perang Dagang Amerika Serikat dan RRT

Setelah terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tahun 2018, sejumlah investor memindahkan fasilitas produksi pemintalan benang kapas di RRT ke beberapa negara untuk menghindari tarif tinggi dan mengoptimalkan biaya produksi. Negara-negara tujuan utama relokasi tersebut diantaranya Vietnam, Taiwan, Thailand, Kamboja, dan Malaysia. Perpindahan fasilitas produksi dari RRT ke negara-negara tersebut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya impor benang kapas secara tidak terduga di Indonesia pada periode 2021-2024.

28. Rencana Pembatasan Ekspor Bahan Baku Kapas India yang Mendorong Peningkatan Produksi Benang Kapas di India

Tahun 2022, harga kapas dunia mengalami lonjakan yang tajam hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan harga ini mendorong para pelaku industri pengguna bahan baku kapas di India meminta pemerintah memberlakukan larangan ekspor kapas mentah. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan menstabilkan harga.² Rencana pelarangan ekspor kapas dari Pemerintah India mengakibatkan produksi benang kapas dan turunan lainnya meningkat sehingga ekspor benang kapas India meningkat ke seluruh dunia. Hal ini menyebabkan terjadinya lonjakan ekspor benang kapas asal India ke Indonesia secara tidak terduga.

29. Pengalihan tujuan Ekspor RRT karena kebijakan pelarangan impor di Amerika Serikat

Tanggal 21 Juni 2022 Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pelarangan impor produk tekstil bahan kapas dari RRT khususnya provinsi Xinjiang apabila produk tersebut dibuat oleh tenaga kerja Uyghur di Xinjiang, RRT. Peraturan tersebut diatur dalam *section 2 of public law No. 117-78, An Act to ensure that goods made with forced labor in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of the People's Republic of China do not enter the United States America, and for other purpose (the Uyghur Forced Labor Prevention Act)*. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut menyebabkan impor produk benang kapas asal RRT di Amerika Serikat mengalami penurunan drastis s.d. tahun 2024, sehingga RRT mengalihkan tujuan ekspor benang kapas-nya ke Negara lain, salah satunya ke Indonesia. Hal ini kemudian secara tidak terduga menyebabkan terjadinya lonjakan impor benang kapas asal RRT di Indonesia.

² *The Economic Times*, "Readymade Garment Exporters Want India to Ban Cotton Exports," <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/readymade-garment-exporters-want-india-to-ban-cotton-exports/articleshow/91591316.cms>.

The Indian Express. "Textile, Garment Industries Demand Cotton Exports Ban: Explained." <https://indianexpress.com/article/explained/textile-garment-industries-demand-cotton-exports-ban-explained-7928198/>.

Tabel 8. Data Ekspor Benang Kapas Dari RRT

Uraian	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%) 2021- 2024
		2021	2022	2023	2024	2021 - 2022	2022 - 2023	2023- 2024	
Ekspor RRT ke Amerika Serikat	Ton	316	257	161	148	(18,67)	(37,35)	(8,07)	(23,99)
Ekspor RRT ke Indonesia	Ton	5.569	8.314	6.907	7.428	49,29	(16,92)	7,55	7,02

Sumber: Trade map dan BPS

B.5.4. Efek Kewajiban Penurunan Konsesi Tarif GATT 1994

30. Batas maksimum tarif konsesi Indonesia terhadap barang diselidiki adalah 15% *ad valorem*. Sebagai informasi, Indonesia telah mengurangi tarif produk impor di banyak sektor termasuk benang kapas dengan rentang tarif *Most Favoured Nation* (MFN) sebesar 5% - 7% selama periode penyelidikan. Dengan demikian, lonjakan impor yang terjadi diakibatkan karena perkembangan tidak terduga dan dampak dari kewajiban penurunan tarif sebagai negara anggota WTO, sesuai dengan persyaratan pada *Article XIX of GATT 1994*.

B.6. Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius**B.6.1. Kinerja Pemohon**

31. Data kinerja Pemohon pada poin 32-37 diperoleh dari hasil analisa atas jawaban kuesioner dan verifikasi. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang dianalisa yaitu volume produksi, volume penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpasang, kapasitas terpakai, laba/rugi, tenaga kerja, dan volume persediaan akhir.

Penjualan Domestik dan Produksi**Tabel 9. Penjualan Domestik, Produksi, dan Persediaan Akhir**

Deskripsi	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%) 2021- 2024
		2021	2022	2023	2024	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	
Produksi	Indeks	100	93,18	65,97	60,00	(6,82)	(29,20)	(9,05)	(17,12)
Penjualan Domestik	Indeks	100	108,11	77,88	70,33	8,11	(27,96)	(9,69)	(12,92)
Persediaan akhir	Indeks	100	114,05	121,78	129,94	14,05	6,78	6,70	8,89

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

32. Selama periode 2021-2024, penjualan domestik mengalami tren penurunan sebesar 12,92%. Seiring dengan tren penurunan penjualan domestik, produksi Pemohon juga mengalami tren yang sama sebesar 17,12%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024, Pemohon belum dapat meningkatkan produksi dan penjualan domestiknya sebagaimana pada tahun 2021 dikarenakan pasar domestik masih dibanjiri oleh barang impor. Pada tahun 2023, penjualan domestik dan produksi mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar

29,20% dan 27,96% akibat dari efek meningkatnya jumlah impor yang signifikan pada tahun 2022.

33. Persediaan akhir Pemohon mengalami tren peningkatan selama tahun 2021-2024 dengan tren sebesar 8,89% dikarenakan menurunnya volume penjualan domestik pada tahun yang sama dengan tren sebesar 12,92%.

Produksi, Kapasitas Terpasang, dan Kapasitas Terpakai

Tabel 10. Produksi, Kapasitas Terpasang, dan Kapasitas Terpakai

Deskripsi	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
		2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Produksi	Indeks	100	93,18	65,97	60,00	(6,82)	(29,20)	(9,05)	(17,12)
Kapasitas terpasang	Indeks	100	94,67	93,38	92,74	(5,33)	(1,37)	(0,69)	(2,37)
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	98,43	70,65	64,70	(1,57)	(28,22)	(8,42)	(15,11)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

34. Turunnya jumlah produksi sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 32 menyebabkan penurunan kapasitas terpakai dengan tren sebesar 15,11% selama periode 2021-2024. Hal ini sejalan dengan menurunnya kapasitas terpasang dengan tren sebesar 2,37% hingga mengakibatkan mesin produksi tidak beroperasi akibat permintaan/*demand* menurun yang menyebabkan jumlah produksi menurun dengan tren sebesar 17,12% selama periode 2021 – 2024.

Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/Kerugian

Tabel 11. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/Kerugian

Deskripsi	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
		2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Produksi	Indeks	100	93,18	65,97	60,00	(6,82)	(29,20)	(9,05)	(17,12)
Tenaga Kerja	Indeks	100	96,98	80,59	73,89	(3,02)	(16,91)	(8,30)	(10,35)
Produktivitas	Indeks	100	96,08	81,87	81,20	(3,92)	(14,79)	(0,81)	(7,55)
Keuntungan/ Kerugian	Indeks	(100)	(269,74)	(214,41)	(238,41)	169,74	(20,51)	11,19	26,83

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

35. Selama periode 2021-2024, tenaga kerja mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,35%. Pada tahun 2023, tenaga kerja mengalami penurunan signifikan sebesar 16,91% dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 96,98 poin indeks menjadi 80,59 poin indeks. Penurunan tenaga kerja sejalan dengan menurunnya jumlah produksi pada tahun yang sama dikarenakan Pemohon masih mengalami kerugian yang sangat besar. Selanjutnya pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja terus mengalami penurunan sebesar 8,30% dibandingkan tahun 2023, yaitu dari 80,59 poin indeks menjadi 73,89 poin indeks. Hal ini disebabkan IDN Pemohon terus

mengalami penurunan produksi dan peningkatan kerugian masing-masing sebesar 9,05% dan 11,19%.

36. Selama periode 2021-2024 produktivitas Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 7,55%. Hal ini disebabkan karena penurunan tren volume produksi jauh lebih besar dibanding penurunan tren tenaga kerja, yaitu masing-masing sebesar 17,12% dan 10,35%.

Penjualan Domestik dan Keuntungan/ Kerugian

Tabel 12. Penjualan Domestik dan Keuntungan/ Kerugian

Deskripsi	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
		2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Penjualan Domestik	Indeks	100	108,11	77,88	70,33	8,11	(27,96)	(9,69)	(12,92)
Keuntungan/ Kerugian	Indeks	(100)	(269,74)	(214,41)	(238,41)	169,74	(20,51)	11,19	26,83

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

37. Selama periode 2021-2024, penjualan domestik mengalami tren penurunan sebesar 12,92% seiring dengan peningkatan kerugian dengan tren sebesar 26,83%. Hal ini merupakan efek dari peningkatan lonjakan jumlah impor barang sejenis yang membuat Pemohon tidak dapat meningkatkan penjualan dan meraih keuntungan.
38. Berdasarkan poin 32-37, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021-2024, Pemohon mengalami **kerugian serius** berdasarkan indikator kinerja yaitu tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, keuntungan/kerugian, tenaga kerja, dan penumpukan persediaan akhir.

Analisa Efek Volume

Tabel 13. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik IDN, Pangsa Pasar Impor, dan Pangsa Pasar IDN

No	Deskripsi	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
			2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
1.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	120,38	84,58	91,48	20,38	(29,74)	8,15	(6,01)
2.	Penjualan Domestik IDN	Indeks	100	119,27	82,62	89,49	19,27	(30,72)	8,31	(6,76)
3.	Jumlah Impor	Ton	20.873	29.908	26.073	27.631	43,28	(12,82)	5,98	7,30
4.	Pangsa Pasar IDN	Indeks	100	99,08	97,68	97,83	(0,92)	(1,41)	0,15	(0,80)
5.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	119,03	147,68	144,71	19,03	24,07	(2,01)	14,16

Sumber: BPS, API, Hasil Verifikasi KPPI, diolah.

39. Berdasarkan Tabel 13 di atas:

- a. Selama periode 2021-2024, konsumsi nasional mengalami penurunan dengan tren sebesar 6,01%. Pada tahun 2023, konsumsi nasional mengalami penurunan secara signifikan sebesar 29,74% dibandingkan

tahun sebelumnya, yaitu dari 120,38 poin indeks menjadi 84,58 poin indeks.

- b. Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 14,16%.
- c. Pangsa pasar IDN mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,80%. Sehingga pangsa pasar IDN tergerus oleh barang impor pada tahun yang sama.

B.6.2. Faktor Lain

40. KPPI juga menganalisa faktor lain di luar lonjakan jumlah barang impor yang dapat mempengaruhi kerugian serius Pemohon sebagai berikut:

a) Teknologi

Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi yang tidak jauh berbeda dengan produsen di negara lainnya dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki dengan kecepatan mata pinal antara 10.000 rpm hingga 15.000 rpm. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian serius yang dialami Pemohon bukan disebabkan karena adanya perbedaan teknologi.

b) Kualitas

Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional seperti SNI 08-0266-1989, SNI 08-0272-1989, dan SNI 08-0033-2006. Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon dalam segi kualitas sudah mampu bersaing dengan barang impor karena sesuai dengan standar di dalam negeri.

c) Kapasitas Terpasang Nasional

Tabel 14. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional

Deskripsi	Satuan	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Nasional terhadap Kapasitas Terpasang Nasional	%	39,57	51,14	37,67	41,39

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI, diolah.

Sebagaimana terlihat Tabel 14 di atas, selama periode 2021-2024 dapat dilihat bahwa konsumsi nasional tidak pernah melebihi kapasitas terpasang nasional, sehingga konsumsi nasional dapat dipenuhi oleh IDN.

41. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 40, tidak ada faktor lain yang memberikan kontribusi terhadap kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

B.7. Hubungan Sebab-Akibat

42. Selama periode 2021-2024 dapat disimpulkan bahwa terbukti adanya kerugian serius yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh lonjakan

jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain, yang didasarkan pada beberapa bukti, yaitu:

- Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut dengan tren sebesar 7,30%, sedangkan lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif dengan tren sebesar 26,70%.
- Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 14,16%. Namun, pangsa pasar IDN mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,80%.
- Terjadinya tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpasang, kapasitas terpakai, produktivitas, tenaga kerja, serta peningkatan kerugian finansial dan jumlah persediaan akhir.
- Sesuai penjelasan pada poin 41, **tidak ada** faktor lain yang menyebabkan kerugian serius yang dialami Pemohon **selain lonjakan jumlah impor** Barang Yang Diselidiki.

C. REKOMENDASI

43. Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, KPPI merekomendasikan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor 27 HS 8-digit, **sesuai BTKI tahun 2022** yaitu:

Tabel 15. 27 Nomor HS 8-Digit Benang Kapas yang Direkomendasikan

Nomor	No. HS	Nomor	No. HS
1.	5204.11.10	15.	5205.48.00
2.	5204.19.00	16.	5206.11.00
3.	5204.20.00	17.	5206.12.00
4.	5205.11.00	18.	5206.14.00
5.	5205.12.00	19.	5206.21.00
6.	5205.21.00	20.	5206.23.00
7.	5205.22.00	21.	5206.24.00
8.	5205.24.00	22.	5206.25.00
9.	5205.26.00	23.	5206.31.00
10.	5205.32.00	24.	5206.32.00
11.	5205.41.00	25.	5206.33.00
12.	5205.42.00	26.	5206.42.00
13.	5205.43.00	27.	5206.45.00
14.	5205.47.00		

Sumber: BTKI 2022

44. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka KPPI merekomendasikan melakukan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) selama 3 (tiga) tahun terhadap impor produk “Benang Kapas” yang terdiri dari 27 Nomor HS 8-digit, sebagai berikut:

Tabel 16. Rekomendasi Pengenaan BMTP

Periode	BMTP
	<i>Specific Duty</i>
Tahun I	Rp. 13.419 / Kg
Tahun II	Rp. 12.614 / Kg
Tahun III	Rp. 11.809 / Kg

45. Sesuai ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan pasal 9.1 WTO *Agreement on Safeguards*, BMTP dimaksud dikenakan importasi yang berasal dari semua negara, kecuali negara-negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen), atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang mempunyai pangsa impor kurang dari 3% (tiga persen).

Tabel 17. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	29	Cuba
2	Albania	30	Democratic Republic of the Congo
3	Angola	31	Djibouti
4	Antigua and Barbuda	32	Dominica
5	Argentina	33	Dominican Republic
6	Armenia	34	Ecuador
7	Bahrain, Kingdom of	35	Egypt
8	Bangladesh	36	El Salvador
9	Barbados	37	Eswatini
10	Belize	38	Fiji
11	Benin	39	Gabon
12	Bolivia, Plurinational State of	40	Gambia, The
13	Botswana	41	Georgia
14	Brazil	42	Ghana
15	Brunei Darussalam	43	Grenada
16	Burkina Faso	44	Guatemala
17	Burundi	45	Guinea
18	Cabo Verde	46	Guinea-Bissau
19	Cambodia	47	Guyana
20	Cameroon	48	Haiti
21	Central African Republic	49	Honduras
22	Chad	50	Hong Kong, China
23	Chile	51	Israel
24	Colombia	52	Jamaica
25	Comoros	53	Jordan
26	Congo	54	Kazakhstan
27	Costa Rica	55	Kenya
28	Cote d'Ivoire	56	Korea, Republic of

No.	Negara	No.	Negara
57	Kuwait, the State of	89	Qatar
58	Kyrgyz Republic	90	Rwanda
59	Lao People's Democratic Republic	91	Saint Kitts and Nevis
60	Lesotho	92	Saint Lucia
61	Liberia	93	Saint Vincent and the Grenadines
62	Macao, China	94	Samoa
63	Madagascar	95	Saudi Arabia, Kingdom of
64	Malawi	96	Senegal
65	Maldives	97	Seychelles
66	Mali	98	Sierra Leone
67	Mauritania	99	Singapore
68	Mauritius	100	Solomon Islands
69	Mexico	101	South Africa
70	Moldova, Republic of	102	Sri Lanka
71	Mongolia	103	Suriname
72	Montenegro	104	Tajikistan
73	Morocco	105	Tanzania
74	Mozambique	106	Thailand
75	Myanmar	107	Timor-Leste
76	Namibia	108	Togo
77	Nepal	109	Tonga
78	Nicaragua	110	Trinidad and Tobago
79	Niger	111	Tunisia
80	Nigeria	112	Uganda
81	North Macedonia	113	Ukraine
82	Oman	114	United Arab Emirates
83	Pakistan	115	Uruguay
84	Panama	116	Vanuatu
85	Papua New Guinea	117	Venezuela, Bolivarian Republic of
86	Paraguay	118	Yemen
87	Peru	119	Zambia
88	Philippines	120	Zimbabwe

Sumber: <https://www.tfadatabase.org/en/groupings/ldcs-developing-members>

D. PENYESUAIAN STRUKTURAL

46. Pengenaan TPP bertujuan agar selama jangka waktu pengenaan Pemohon dapat melakukan penyesuaian struktural sehingga ketika pengenaan Tindakan Pengamanan berakhir, produk Pemohon dapat bersaing dengan barang impor.
47. Tanggal 7 Mei 2025, KPPI telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki (ITKAK), Direktorat Teknis Kepabeanaan, Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dalam rangka pembahasan terkait rencana program penyesuaian struktural yang akan dilakukan oleh Pemohon.
48. Berdasarkan poin 47, disepakati bahwa penyesuaian struktural yang akan dilakukan Pemohon berdasarkan pada tabel di bawah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Penyesuaian Struktural

No.	Rencana Program	Rencana Kegiatan	Satuan	Tahun		
				Pertama	Kedua	Ketiga
1.	Efisiensi Produk	a. Optimalisasi produksi melalui efisiensi produksi;	%	3	5	7
		b. Optimalisasi produksi melalui efisiensi pemakaian bahan baku; dan	%	2	4	5
		c. Diversifikasi produk.	Jumlah	1	2	3
2.	Produktivitas Tenaga Kerja	a. Mengadakan pelatihan berkala bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen; dan	Jumlah	2	4	6
		b. Penambahan jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan tenaga kerja.	Jumlah	10	20	30
3.	Kualitas Produk	a. Pengurangan tingkat kecacatan produk; dan	%	1	2	3
		b. Penambahan sertifikasi produk.	Jumlah	1	2	3
4.	Perubahan Teknologi	a. Penggunaan mesin dengan teknologi otomatis, <i>software</i> , dan/atau digitalisasi; dan	Jumlah	2	3	5
		b. Investasi mesin/teknologi.	Jumlah	1	2	3
5.	Strategi Purna Produksi	a. Perluasan daerah target pasar; dan	%	5	10	15
		b. Promosi dan digital marketing ke pelanggan baru.	Jumlah	2	4	6

49. Adapun nilai persentasi pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Peningkatan efisiensi produksi melalui:

- Optimalisasi produksi melalui efisiensi produksi;
- Optimalisasi produksi melalui efisiensi pemakaian bahan baku;
- Diversifikasi produk

b. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, dengan cara:

- Pelatihan berkala bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen;
- Penambahan jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kemampuan tenaga kerja.

c. Peningkatan kualitas produk, dengan cara:

- Pengurangan tingkat kecacatan produk;
- Penambahan sertifikasi produk.

d. Perubahan/pengembangan teknologi, melalui cara:

- Penggunaan mesin dengan teknologi otomasi, *software*, dan/atau digitalisasi;
- Investasi mesin/teknologi.

e. Perbaikan strategi purna produksi, dengan cara:

- Perluasan target pasar (lokal/ekspor);
- Promosi dan *digital marketing* ke pelanggan baru.

Jakarta, 22 Mei 2025

LAMPIRAN 1**Lampiran 1. Daftar Produsen yang Diwakili Pemohon**

Nama Perusahaan	Alamat
1. PT. Bitratex Industries	Jl. Taman Curie No.3, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
2. PT. Delta Merlin Sandang Tekstil	Jl. Raya Timur, Kenatan, Bumiaji, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57254 (KM 10)
3. PT. Delta Dunia Sandang Tekstil	Jl. Raya Semarang- Demak Km.14, Tambakroto, Sayung, Batu Lor, Batu, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
4. PT. Delta Dunia Tekstil	Jl. Maospati - Solo, Gerdu, Jetis, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57731
5. PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil	Jl. H. Fachrudin No.36, RT.9/RW.5, Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat
6. PT. Delta Merlin Dunia Tekstil	Pd. III, Pondok, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552
7. PT. Damaitex	Jl. Simongan No.100, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148
8. PT. Embee Plumbon	Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220
9. PT. Lotus Indah Textile Industries	Jl. Prof. Dr. Sutami No.111 B, Sukarasa, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153
10. PT. Gokak Indonesia	Jalan Ateng Ilyas No 1 RT 02/08, Kampung Muhara, Citeurep, Bogor 16810, Jawa Barat
11. PT. Kewalram Indonesia	Jalan Raya Rancaekek KM 25, Kab. Sumedang, Jawa Barat
12. PT. Primayudha Mandirijaya	Dusun 3, Ngadirojo, Kec. Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57352
13. PT. Sariwarna Asli	Jl. Hos Cokroaminoto no.28 Pucang Sawit, Surakarta, Jawa Tengah 57125
14. PT. Sinar Pantja Djaja	Jl. Condrokusumo Raya No.1, Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148
15. PT. Sri Rejeki Isman, Tbk	Jl. KH. Samanhudi 88, Jetis, Sukoharjo, Solo Jawa Tengah

Sumber: Pemohon

LAMPIRAN 2

**Lampiran 2. Uraian Nomor HS Barang Yang Diajukan Permohonan
Penyelidikan TPP**

No	No. HS	Uraian Barang Impor berdasarkan BTKI 2022	
		Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
	5204	Benang jahit dari kapas, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.	<i>Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale.</i>
1	5204.11.10	- - - Tidak dikelantang	- - - <i>Unbleached</i>
2	5204.19.00	- - Lain-lain	- - <i>Other</i>
3	5204.20.00	- Disiapkan untuk penjualan eceran	- <i>Put up for retail sale</i>
	52.05	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran	<i>Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by weight of cotton, not put up for retail sale</i>
4	5205.11.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	- - <i>Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
5	5205.12.00	- - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43) -	- - <i>Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)</i>
6	5205.21.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	- - <i>Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
7	5205.22.00	- - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43) -	- - <i>Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)</i>
8	5205.24.00	- - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	- - <i>Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)</i>
9	5205.26.00	- - Ukuran kurang dari 125 desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94)	- - <i>Measuring less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number)</i>
10	5205.32.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
11	5205.41.00	- - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)</i>

12	5205.42.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
13	5205.43.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)</i>
14	5205.47.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn)</i>
15	5205.48.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn)</i>
	52.06	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.	<i>Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85% by weight of cotton, not put up for retail sale.</i>
16	5206.11.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	- - <i>Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
17	5206.12.00	- - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	- - <i>Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)</i>
18	5206.14.00	- - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	- - <i>Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)</i>
19	5206.21.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	- - <i>Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
20	5206.23.00	- - Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)	- - <i>Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)</i>
21	5206.24.00	- - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	- - <i>Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)</i>

22	5206.25.00	- - Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)	- - <i>Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)</i>
23	5206.31.00	- - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)</i>
24	5206.32.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
25	5206.33.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)</i>
26	5206.42.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
27	5206.45.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn)</i>

Sumber: Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022

**FINAL REPORT OF INVESTIGATION RESULTS
TRADE SAFEGUARD MEASURES
ON IMPORTS OF COTTON YARN GOODS**

**27 (TWENTY SEVEN) *HARMONIZED SYSTEM* NUMBER
(HS NO.) 8-DIGIT**

BASED ON THE 2022 INDONESIAN CUSTOMS TARIFF BOOK

UNSECRET VERSION

**INDONESIAN TRADE SECURITY COMMITTEE
(KPPI)
2025**

LIST OF CONTENTS

FOREWORD.....	4
A. INTRODUCTION.....	5
A.1. Background.....	5
Applicant's Identity	6
Proportion.....	6
Period.....	6
Notifications	6
Hearings.....	7
A.2. Applicant's Identity	6
A.3. Large	
A.4. Investigation	
A.5. Procedures and	
A.6. Public	
B. INVESTIGATION.....	8
B.1. Proof of Similar Goods or Goods that are Directly	
Competitive.....	8
B.2. Cotton	
Yarn Produced by the Applicant.....	8
B.3. Imported	
Goods.....	11
B.4. Conclusion of Evidence of the	
Goods Under Investigation.....	12
B.5 . Surge in the Amount of Imports of the Goods	
Under Investigation	12
B.5.1. Absolute Surge in the Amount of	
Imports.....	12
B.5.2. Surge in the Amount of Imports Relative to	
National Production ...	13
B.5.3. Unexpected Developments	14
B.5.4. Effect of the Obligation to Reduce Tariff Concessions of GATT 1994	16
B.6. Serious Harm / Threat of Serious Harm	16
B.6.1. Applicant	
Performance	16
Domestic Sales and	
Production.....	16
Production, Installed Capacity, and Utilized	
Capacity.....	17
Production, Labor, Productivity, and Profit/	
Loss.....	17
Domestic Sales and Profit/Loss	18
Volume Effect Analysis.....	18
B.6.2. Other	
Factors.....	19
B.7. Causal	
Relationships.....	19
C. RECOMMENDATIONS	20
D. STRUCTURAL ADJUSTMENTS.....	24

LIST OF TABLES

Table 1. 27 8-Digit HS Numbers of Cotton Yarn Investigated by KPPI 5 Table 2. Production Proportion in 2024 6 Table 3. 27 8-Digit HS Numbers of Cotton Yarn Investigated by KPPI 12 Table 4. Total Absolute Imports of Investigated Goods..... 12 Table 5. Relative Imports of Overall Investigated Goods Compared to National Production 13 Table 6. Market Share of Import Origin Countries..... 13 Table 7. Country of Origin of Cotton Yarn Imports in Indonesia in the 2019-2024 Period 14 Table 8. Cotton Yarn Export Data from the PRC..... 16 Table 9. Domestic Sales, Production, and Ending Inventories 16 Table 10. Production, Installed Capacity, and Utilized Capacity 17 Table 11. Production, Labor, Productivity, and Profit/Loss 17 Table 12. Domestic Sales and Profit/Loss..... 18 Table 13. National Consumption, Total Imports, IDN Domestic Sales, Import Market Share, and IDN Market Share..... 18 Table 14. Comparison of Installed Capacity and National Consumption..... 19 Table 15. 27 Recommended 8-Digit HS Numbers for Cotton Yarn..... 20 Table 16. Recommendations for Imposing BMTP..... 21 Table 17. List of WTO Member Countries Excluded from BMTP 22 Table 18. Realization of Structural Adjustments 24

LIST OF FIGURES

Figure 1. Cotton Yarn Production Process Flow 9

APPENDIX LIST

Attachment 1. List of Producers Represented by the Applicant 26 Attachment 2. Description of HS Numbers of Goods Submitted for TPP Investigation Application 27

FOREWORD

We express our gratitude to the presence of Almighty God who has given His grace and guidance, so that the Indonesian Trade Safeguard Committee (KPPI) can complete the investigation into the imposition of Trade Safeguard Measures (TPP) on imported Cotton Yarn goods in the context of recovery and prevention of losses/threats of serious losses experienced by the Domestic Industry (IDN) due to the surge in the number of imported goods, as mandated in the provisions of Article 95 paragraph (1).

Government Regulation No. 34 of 2011 concerning Antidumping Measures, Countervailing Measures, and Trade Safeguard Measures (PP 34 of 2011).

The aim of the investigation is to prove that the serious losses/threat of serious losses experienced by IDN are the result of a surge in the number of imported goods as regulated in the provisions of Article 70 paragraph (1) of PP 34 of 2011.

Special thanks are extended to Mr. DR. Budi Susanto, M.SI., Minister of Trade, for his support to KPPI in conducting the investigation, and also to the Ministries/Institutions, IDN, and other interested parties for their support during the investigation.

Finally, we hope that the Final Report of the investigation into the imposition of Safeguard Measures on imported Cotton Yarn will be useful for readers and other interested parties, especially in the context of providing protection to the Indonesian Domestic Industry.

Jakarta, May 2025

Julia Gustaria Silalahi

Chairman of KPPI

A. INTRODUCTION

A.1. Background

1. On September 18, 2023, the Indonesian Trade Safeguard Committee (KPPI) received an Application from the Indonesian Textile Association (API), hereinafter referred to as the Applicant, representing 15 (fifteen) companies, to conduct an investigation in order to impose Trade Safeguard Measures (TPP) on the import of "Cotton Yarn" goods consisting of 27 (twenty-seven) 8-digit *Harmonized System* (HS) Numbers in accordance with the 2022 Indonesian Customs Tariff Book (BTKI), which resulted in serious losses or threats of serious losses to the Domestic Industry (IDN), as follows:

Table 1. 27 8-Digit HS Numbers of Cotton Yarn Investigated by KPPI

No	HS Number	No	HS Number
1.	5204.11.10	15.	5205.48.00
2.	5204.19.00	16.	5206.11.00
3.	5204.20.00	17.	5206.12.00
4.	5205.11.00	18.	5206.14.00
5.	5205.12.00	19.	5206.21.00
6.	5205.21.00	20.	5206.23.00
7.	5205.22.00	21.	5206.24.00
8.	5205.24.00	22.	5206.25.00
9.	5205.26.00	23.	5206.31.00
10.	5205.32.00	24.	5206.32.00
11.	5205.41.00	25.	5206.33.00
12.	5205.42.00	26.	5206.42.00
13.	5205.43.00	27.	5206.45.00
14.	5205.47.00		

Source: BTKI 2022

2. In accordance with Government Regulation Number 34 of 2011 (PP 34/2011), KPPI conducted research on the initial evidence of the investigation request for the imposition of TPP on imports of Cotton Yarn. From the results of the analysis of the initial evidence, there were indications of a surge in the number of imports of the goods in question, as well as Serious Losses or Threats of Serious Losses experienced by the Applicant due to the surge in the number of imported goods.
3. In connection with point 2 and based on PP 34/2011 concerning Antidumping Measures, Countervailing Measures, and Trade Safeguard Measures, the KPPI decided to accept the application and determine the commencement of the investigation for the imposition of TPP on imports of cotton yarn goods on October 27, 2023, which was immediately announced through the *Bisnis Indonesia* newspaper and the Ministry of Trade *website* on the same day.

A.2. Applicant's Identity

4. The applicant's identity is as follows:

Name : Indonesian Textile Association
 Address : Graha Surveyor Indonesia, 16th Floor, Jl.
 Jend. Gatot Subroto Kav. 56, South Jakarta
 Tel./Fax : (021) 5272171 / 021-5272166
 Email : secretariat@bpnapi.org
 Contact Person : Andrew Purnama
 Position: Secretary General of API

A.3. Large Proportion

5. In accordance with Article 1 Number 18 of PP 34/2011, the Applicant's cumulative production proportion is large, namely 61% of the total national production in 2024, so the Applicant has fulfilled the requirements to represent IDN, as shown in table 2 below.

Table 2. Production Proportion in 2024

Description	Proportion (%)
Applicant's Production	61
Non-Applicant Production	39
National Production	100

Source: Applicant and Verification Results

6. Based on Table 2 above, the Applicant's production proportion is 61% and the Non-Applicant's production proportion is 39% of the total national production. Thus, the Applicant is declared to have fulfilled the *major proportion* requirements according to Article 4.1(c) of the *Agreement on Safeguards* (AoS) and Article 1 number 18 of Government Regulation Number 34 of 2011 (PP 34/2011) to represent IDN.

A.4. Investigation Period

7. The investigation period for data that experienced a surge in the number of imports claimed by the Applicant was 2019-2022 (for 4 years), then data updating was carried out by KPPI in the period 2021-2024.

A.5. Procedures and Notifications

8. In accordance with Article 74 Paragraph (2) of PP 34/2011, on October 27 2023, KPPI will provide written notification regarding the commencement of the investigation to the Applicant and other Interested Parties (PYB).

9. In accordance with Article 12.1(a) in the WTO AoS, the Government of the Republic of Indonesia sent an Article 12.1(a) Notification to the *Committee on Safeguards* at the WTO on October 27, 2023 regarding the commencement of an investigation.

On November 1, 2023, the notification was circulated by the WTO under document number G/SG/N/6/IDN/43.

10. In accordance with Article 79 Paragraph (1) of PP 34/2011 and *Article 3* WTO AoS, on November 28, 2023, KPPI held a public hearing to provide an opportunity for PYB to present evidence, views and responses regarding the commencement of the TPP investigation into the import of Cotton Yarn. There were 41 (forty-one) people present at the public hearing, consisting of 6 (six) representatives of the Government of the country of origin of the import, 1 (one) representative of the exporters association, 2 (two) representatives of the importers association, 24 (twenty-four) representatives of the relevant Ministries/Institutions, and 8

(eight) people from the Applicant's representatives and the Applicant's member companies.

11. In accordance with Article 78 Paragraph (1) letter a of PP 34/2011, on January 19 2024, KPPI requested a written explanation in the form of a questionnaire from the Applicant member company and the questionnaire answers were returned to KPPI in stages from February 19 2024 to June 6 2024 accompanied by supporting evidence.

12. In order to check the accuracy of the data and information statements contained in the questionnaire answers submitted by the Applicant on June 11-14, 2024, KPPI conducted field verification of the Applicant's company in Surakarta, Central Java.

13. On July 5, 2024, KPPI requested a written explanation in the form of a questionnaire from the Applicant (API) regarding the consolidation of company and national data. Subsequently, on October 1, 2024, API returned the questionnaire to KPPI.

14. In connection with point 7, on January 17, 2025, KPPI requested an update of the data for the January-December 2024 investigation period.
in writing in the form of a questionnaire to the Applicant and has been returned to KPPI on February 27, 2025.

A.6. Public Hearing

15. The public hearing was held on November 28, 2023 in the Orchid Room, 12th Floor, Ministry of Trade, attended by 41 (forty-one) people, consisting of 6 (six) representatives of the Government of the exporting country, 1 (one) representative of the exporter association, 2 (two) representatives of the importer association, 24 (twenty-four) representatives of the relevant Ministries/Institutions, 8 (eight) representatives of the Applicant and the Applicant's member companies. This public hearing was held to provide an opportunity for the Interested Parties (PYB) to present evidence, views and responses regarding the commencement of the TPP investigation into the import of Cotton Yarn goods.

B. INVESTIGATION

B.1. Proof of Similar Goods or Goods that are Directly Compete

16. In order to prove whether the Investigated Goods are Similar Goods or Directly Competitive with the Cotton Yarn produced by the Applicant, KPPI has requested data and information evidence by sending a questionnaire and field verification to the Applicant. In addition, KPPI also obtained data and information evidence from the cotton yarn Importer regarding the specifications of the imported goods.

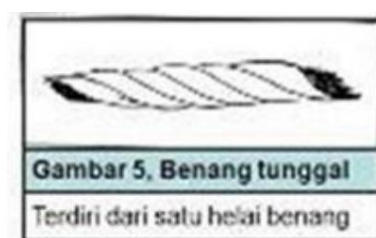
B.2. Cotton Yarn Produced by the Applicant

17. The characteristics, production process flow, raw materials, standardization, and uses of the cotton yarn produced by the Applicant are as follows:

Physical Characteristics

The Applicant's production goods have the following physical characteristics:

- 1) Cotton sewing thread is a double (folded) thread or cable thread made of cotton fibers wound on *reels* or *tubes* with a weight not exceeding 1,000 grams, given a *finishing treatment* for sewing purposes and with a "Z" twist, consisting of:
 - a) Cotton sewing thread, not prepared for retail sale.
 - b) Cotton sewing thread, prepared for retail sale (single, double (folded) thread or cord wound on a thread reel).
- 2) Cotton thread (other than sewing thread), not prepared for sale retail, consisting of:
 - a) Single yarn is yarn that is made up of one filament (monofilament), or two or more filament yarns (multifilament), combined into one with a twist (*twisted*) or without a twist (*untwisted*).



- b) Double (folded) yarn is yarn formed from two or more single yarns, including those obtained from monofilament (*twofold*, *threefold*, *fourfold yarn*, etc.) *twisted* together in one twisting process. However, monofilament yarn combined separately with a twist

(*twisted*) is not included as a double (folded) thread.



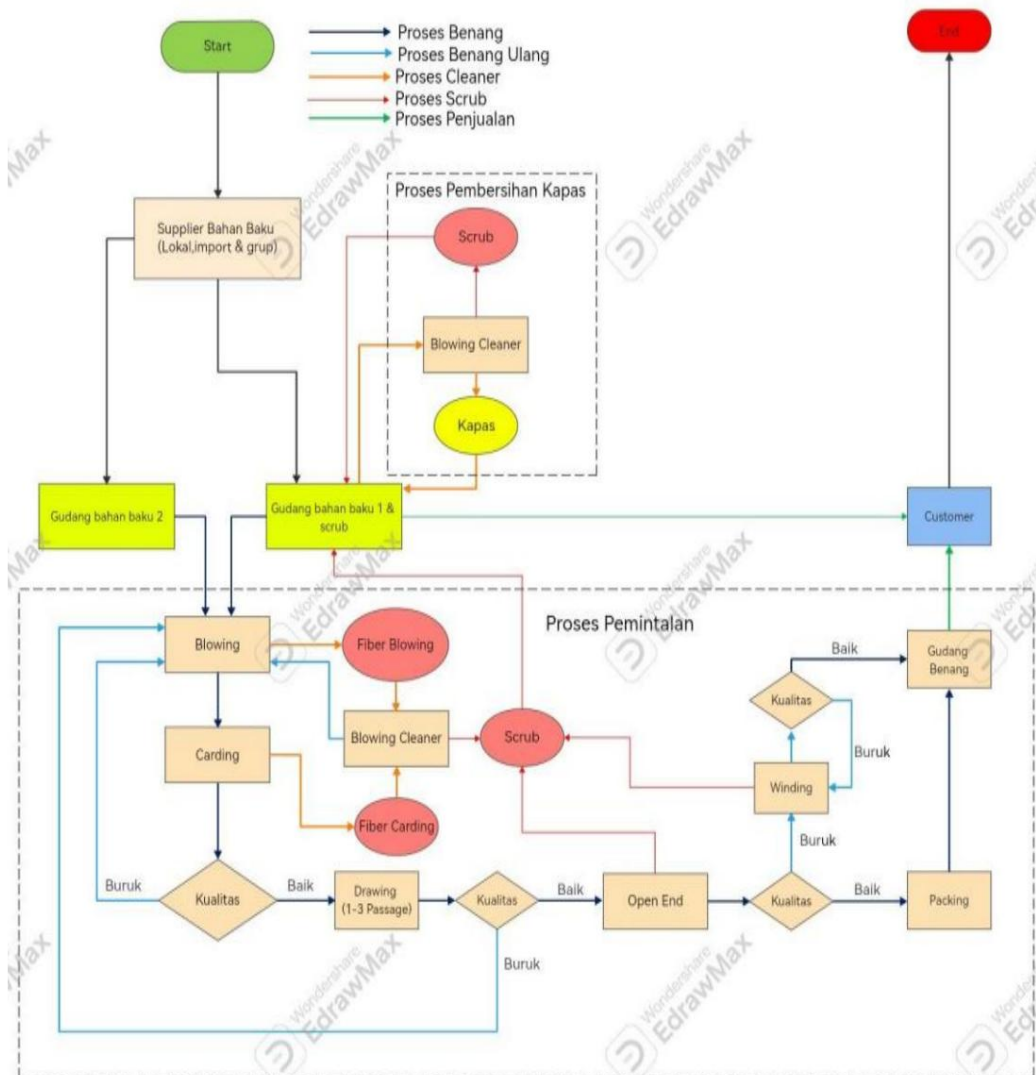
- c) Cable yarn is yarn formed from two or more yarns, one of which is a double (folded) yarn, twisted *together* in one or more folds.



Production Process Flow

The flow of the cotton yarn production process is as follows:

Figure 1. Cotton Yarn Production Process Flow



Source: Applicant

Production Process Flow Description:**1. *Blowing* Process**

- Mixing fibers.
- Opening the fiber clumps.
- Clean dirt.
- Make a roll of rags.

2. *Carding* Process

- Opens up the fiber clumps further, so that the fibers decompose from each other.
- Cleans any dirt that is still in the fiber clumps or that is stuck. • Separates very short fibers from long fibers (*main fiber*). • Forms the fibers into *slivers*.

3. *Drawing* Process

- Straightening and aligning the fibers in the sliver along the axis of the sliver. • Improving the evenness of the weight per unit length, blending, or other properties by means of doubling. • Adjusting the weight per unit length of the sliver to the requirements of the next process.

4. *Open End* Process

- *Drafting* (stretching), the process of stretching the incoming sliver by unraveling it with a comb.
- *Twisting* is an essential requirement in yarn production. Its purpose is to give the yarn a certain number of twists according to the yarn number spun.
- *Winding* (winding), the process of forming a roll of thread

5. *Winding* Process

Improve the quality of the thread on the spool.

6. *Packing* Process

Provide packaging for yarn *cones* to maintain yarn quality.

Raw material

The Applicant's Production Goods have the same raw materials as imported goods, namely:

- 1) The raw material for cotton sewing thread is a single thread from cotton, including that obtained from monofilament (twofold, *threefold*, *fourfold*, etc.) and given a *finishing treatment*.

2) Raw materials for cotton thread (other than sewing thread) are:

a) Uncombed fiber (*carded*): the main purpose of *carding* is to separate the cotton fibers, lay the fibers more or less parallel, and clean the fibers from non-cotton fiber content for most or all of the fibers.

b) *Combed* fiber is the process of cleaning uncombed fiber from the remaining contents outside the fiber and removing short fibers, so that only the long fibers of the cotton fibers are left which are laid parallel.

Utility

The Applicant's Production Goods have the same uses as imported goods, namely:

1) The use of cotton sewing thread is for sewing.

2) The use of cotton thread (apart from sewing thread) is for woven or knitted into cloth.

B.3. Imported Goods

18. In accordance with Article 1 Number 27 of PP 34/2011, what is meant by Goods Under Investigation are **imported goods** that have experienced a surge in quantity, which are the object of investigation, which are stated in the description and specifications of the goods and the tariff post number according to the 2022 BTKI.

19. *The Harmonized System* (HS) number for imported Cotton Yarn goods for which a TPP investigation application was submitted based on the 2022 Indonesian Customs Tariff Book (BTKI) is:

20. The characteristics, raw materials, standardization, and uses of imported goods are as follows:

Characteristics

The characteristics of imported Cotton Yarn goods are the same as the characteristics produced by the Applicant as stated in point 17.

Raw material

The raw materials for imported goods are generally the same as those produced by the Applicant as stated in point 17.

Utility

The use of imported goods is the same as that produced by the Applicant, namely as stated in point 17.

B.4. Conclusion of Evidence of the Investigated Goods

21. Based on the explanation of points 17-20, it can be concluded that the imported goods "Cotton Yarn with 27 8-digit HS numbers according to the 2022 BTKI are Similar Goods or Goods that Directly Compete with the goods produced by the Applicant because they have similar characteristics, production process flow, raw materials, and uses, as follows:

Table 3. 27 8-Digit HS Numbers of Cotton Yarn Investigated by KPPI

No	HS Number	No	HS Number
1.	5204.11.10	15.	5205.48.00
2.	5204.19.00	16.	5206.11.00
3.	5204.20.00	17.	5206.12.00
4.	5205.11.00	18.	5206.14.00
5.	5205.12.00	19.	5206.21.00
6.	5205.21.00	20.	5206.23.00
7.	5205.22.00	21.	5206.24.00
8.	5205.24.00	22.	5206.25.00
9.	5205.26.00	23.	5206.31.00
10.	5205.32.00	24.	5206.32.00
11.	5205.41.00	25.	5206.33.00
12.	5205.42.00	26.	5206.42.00
13.	5205.43.00	27.	5206.45.00
14.	5205.47.00		

Source: BTKI 2022

B.5. Surge in the Number of Imported Goods Under Investigation**B.5.1. Absolute Surge in Imports****Table 4. Total Absolute Number of Imported Goods Investigated**

Description	Year				Growth (%) 2021-			Trend (%)
	2021	2022	2023	2024	2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Amount Imports (Tons)	20,873	29,908	26,073	27,631	43.28 (12.82)	5.98		7.30

Source: Ministry of Trade Information System Data Center (PDSI), BPS, processed.

22. The absolute import volume for the 2021-2024 period experienced an upward trend of 7.30%. In 2021, imports were 20,873 tons, rising to 29,908 tons in 2022, representing a 43.28% increase. Then, in 2023, imports decreased to 26,073 tons, representing a 12.82% increase.

In 2024, the number of imports increased again to 27,631 tons or 5.98%.

B.5.2. Increase in Imports Relative to National Production**Table 5. Relative Imports of Overall Goods Investigated Compared to National Production**

Description	Year				Growth (%)			Trend (%)
	2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Amount Imports (Tons)	20,873	29,908	26,073	27,631	43.28	(12.82)	5.98	7.30
National Production (Index)	100	117.13	71.01	67.88	17.13	(39.37)	(4.41)	(15.32)
Relative Imports (Index)	100	122.33	175.90	195.01	22.33	43.79	10.87	26.70

Source: PDSI Ministry of Trade, BPS, KPPI verification results, processed.

23. As shown in Table 5 above, the relative value of imports relative to national production during the 2021-2024 period experienced a significant increase of 26.70%. This is because, while imports increased, domestic production continued to decline. In 2021, relative imports increased by 100 index points to 122.33 index points in 2022. Then, in 2023, relative imports

experienced an increase again to 175.90 index points, then in 2024 the number of imports increased again to 195.01 index points.

Table 6. Market Share of Import Origin Countries

No. Sort	Country of origin Import	2024	
		Volume (Tons)	Share (%)
	Vietnam	11,866	42.94
1 2	People's Rep. of China	7,428	26.88
3	India	3,276	11.85
4	Taiwan	2,171	7.86
5	Malaysia	1,146	4.15
6	Turkey	947	3.43
7	Other Countries of the World	798	2.89
		27,631	100

Source: PDSI Ministry of Trade, BPS, processed.

24. Based on Table 6 above, the largest country of origin of imports in 2024 is Viet Nam with a share of 42.94%, followed by the People's Republic of China (PRC) with a share of 26.88%, India with a share of 11.85%, Taiwan with a share of 7.86%, Malaysia with a share of 4.15%, Turkey with a share of 3.43%, and Other Countries (e.g. South Korea, Pakistan, and Thailand), with a share of 2.89%.

B.5.3. Unexpected Developments

25. The surge in imports of the Investigated Goods from exporting countries was unpredictable. This was due to the Covid-19 pandemic, the US-PRC trade war, restrictions on cotton exports in India, and the shift in destination of PRC exports from the US to Indonesia.

26. Supply Chain Disruption Due to the COVID-19 Pandemic

The pandemic has led to massive restrictions in Indonesia. Many cotton yarn producers have temporarily closed, resulting in reduced production and reduced workforces.

This situation opened up opportunities for other countries to supply cotton yarn to large markets such as Indonesia, which was then forced to impose restrictions.

Vietnam was one of the countries that successfully controlled the initial wave of the pandemic (especially in 2020–2021). Many factories in Vietnam remained operational, and cotton yarn exports from Vietnam to Indonesia have increased significantly since the pandemic began.¹

Meanwhile, Indonesia is still in the process of handling COVID-19, and cotton demand is quite high for the production of Personal Protective Equipment (PPE). This has led to an unexpected surge in imports of Vietnamese cotton yarn in Indonesia. Previously, in 2019 and 2020, the largest share of cotton yarn imports came from China, but from 2021 to 2024, Vietnam dominated Indonesia's cotton yarn imports.

Table 7. Country of Origin of Cotton Yarn Imports in Indonesia in the period 2019-2024

Country of Origin of Import	Weight: Ton					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vietnam	5,307	3,670	9,574	13,652	12,587	11,866
People's Republic of China	5,633	4,554	5,569	8,314	6,907	7,428
India	1,628	1,736	1,887	2,452	3,221	3,276
Taiwan	290	47	218	65	2,171	
Malaysia	78	343	94	204	1,146	

Source: PDSI Ministry of Trade, BPS, processed

¹ *Foreign Agricultural Service*. (April 5, 2022). *Cotton and Products Annual: Vietnam* (GAIN Report No. VM2022-0021). *United States Department of Agriculture*.
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Cotton%20and%20Products%20Annual_Hanoi_Vietnam_VM2022-0021.pdf

27. **Relocation of Cotton Yarn Production Facilities Due to Trade War United States and China**

Following the 2018 trade war between the United States and China, several investors relocated their cotton yarn spinning production facilities in China to other countries to avoid high tariffs and optimize production costs. The primary destinations for these relocations include Vietnam, Taiwan, Thailand, Cambodia, and Malaysia.

The relocation of production facilities from China to these countries contributed to an unexpected increase in cotton yarn imports in Indonesia in the 2021-2024 period.

28. **India's Plan to Restrict Exports of Raw Cotton Materials to Encourage Increased Cotton Yarn Production in India**

In 2022, global cotton prices experienced a sharp increase, almost doubling compared to the previous year. This price increase prompted cotton raw material users in India to call on the government to impose a ban on raw cotton exports. This was necessary to ensure raw material availability and stabilize prices.

India's growth has led to increased production of cotton yarn and other derivatives, leading to a surge in global exports of Indian cotton yarn. This has led to an unexpected surge in Indian cotton yarn exports to Indonesia.

29. **Diversion of PRC export destinations due to import ban policies in United States of America**

On June 21, 2022, the United States issued a ban policy import of cotton textile products from the PRC, especially Xinjiang province if the product is made by Uyghur workers in Xinjiang, PRC.

The regulation is regulated in *section 2 of public law No. 117-78, An Act to ensure that goods made with forced labor in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of the People's Republic of China do not enter the United States, America, and for other purposes (the Uyghur Forced Labor Prevention Act)*. With the enactment of this regulation, imports of cotton yarn products from the PRC in the United States have decreased drastically until 2024, so that the PRC shifts the destination of its cotton yarn exports to other countries, one of which is Indonesia.

This then unexpectedly caused a surge in imports of cotton yarn from the PRC in Indonesia.

2 The Economic Times, "Readymade Garment Exporters Want India to Ban Cotton Exports," <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/readymade-garment-exporters-want-india-to-ban-cotton-exports/articleshow/91591316.cms>.

The Indian Express. "Textile, Garment Industries Demand Cotton Exports Tires: Explained." <https://indianexpress.com/article/explained/textile-garment-industries-demand-cotton-exports-ban-explained-7928198/>.

Table 8. Cotton Yarn Export Data from China

Description	Unit	Year				Change (%) 2021 -			Trend (%) 2021- 2024
		2021	2022	2023	2024	2022	2022 - 2023	2023- 2024	
PRC exports to United States of America	Ton	316	257	161	148	(18.67)	(37.35)	(8.07)	(23.99)
PRC exports to Indonesia	Ton	5,569.8	314.6	907.7	428.4	9.29	(16.92)	7.55	7.02

Source: Trade map and BPS

B.5.4. Effects of the GATT 1994 Tariff Concession Reduction Obligation

30. Indonesia's maximum concessional tariff limit on the goods under investigation is 15% *ad valorem*. For your information, Indonesia has reduced tariffs on imported products in many sectors, including cotton yarn, with a range of *Most Favored Nation* (MFN) tariffs of 5% - 7% during the investigation period. Thus, the surge in imports was due to unforeseen developments and the impact of the obligation tariff reduction as a WTO member country, in accordance with the requirements of *Article XIX of GATT 1994*.

B.6. Serious Loss / Threat of Serious Loss**B.6.1. Applicant's Performance**

31. The Applicant's performance data in points 32-37 was obtained from the analysis of questionnaire responses and verification. Eight performance indicators were analyzed, namely production volume, domestic sales volume, productivity, installed capacity, utilized capacity, profit/loss, labor, and ending inventory volume.

Domestic Sales and Production**Table 9. Domestic Sales, Production, and Ending Inventories**

Unit Description		Year				Change (%)			Trend (%) 2021- 2024
		2021	2022	2023	2024	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	
Production	Index	100	93.18	65.97	60.00	(6.82)	(29.20)	(9.05)	(17.12)
Sale Domestic	Index	100	108.11	77.88	70.33	8.11	(27.96)	(9.69)	(12.92)
Ending inventory	Index	100	114.05	121.78	129.94	14.05	6.78	6.70	8.89

Source: KPPI Verification Results

32. During the 2021-2024 period, domestic sales experienced a downward trend of 12.92%. In line with the downward trend in domestic sales, the Applicant's production also experienced a similar trend of 17.12%. This is because in 2024, the Applicant was unable to increase its domestic production and sales as previously planned.

2021 because the domestic market is still flooded with imported goods. In 2023, domestic sales and production experienced a significant decline compared to the previous year, each by

29.20% and 27.96% due to the significant increase in imports in 2022.

33. The Applicant's ending inventory experienced an increasing trend during 2021-2024 with a trend of 8.89% due to a decrease in domestic sales volume in the same year with a trend of 12.92%.

Production, Installed Capacity, and Used Capacity

Table 10. Production, Installed Capacity, and Used Capacity

Unit Description		Year				Change (%)			Trend (%)
		2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Production	Index	100	93.18	65.97	60.00	(6.82)	(29.20)	(9.05)	(17.12)
Installed capacity	Index	100	94.67	93.38	92.74	(5.33)	(1.37)	(0.69)	(2.37)
Capacity Used	Index	100	98.43	70.65	64.70	(1.57)	(28.22)	(8.42)	(15.11)

Source: KPPI Verification Results

34. The decline in production volume as explained in point 32
This resulted in a 15.11% decline in utilized capacity during the 2021-2024 period. This coincided with a 2.37% decline in installed capacity, resulting in production machines being idled due to declining demand, which led to a 17.12% decline in production during the 2021-2024 period.

Production, Labor, Productivity, and Profit/Loss

Table 11. Production, Labor, Productivity, and Profit/Loss

Description	Unit	Year				Change (%)			Trend (%)
		2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Production	Index	100	93.18	65.97	60.00	(6.82)	(29.20)	(9.05)	(17.12)
Power Work	Index	100	96.98	80.59	73.89	(3.02)	(16.91)	(8.30)	(10.35)
Productivity	Index	100	96.08	81.87	81.20	(3.92)	(14.79)	(0.81)	(7.55)
Profit/Loss	Index	(100)	(269.74)	(214.41)	(238.41)	169.74	(20.51)	11.19	26.83

Source: KPPI Verification Results

35. During the 2021-2024 period, the workforce experienced a decline with a trend of 10.35%. In 2023, the workforce experienced a significant decline of 16.91% compared to 2022, from 96.98 index points to 80.59 index points. The decline in the workforce is in line with the decline in production volume in the same year, as the Applicant continues to experience significant losses.

Furthermore, in 2024, the number of workers continued to decline by 8.30% compared to 2023, from 80.59 index points to 73.89 index points. This was due to the continued decline in the applicant's IDN.

experienced a decrease in production and an increase in losses of 9.05% and 11.19% respectively.

36. During the 2021-2024 period, the Applicant's productivity experienced a downward trend of 7.55%. This was because the decline in production volume was much greater than the decline in the workforce. namely 17.12% and 10.35% respectively.

Domestic Sales and Profit/Loss

Table 12. Domestic Sales and Profit/Loss

Unit Description		Year				Change (%)			Trends (%)
		2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Sale Domestic	Index	100	108.11	77.88	70.33	8.11	(27.96)	(9.69)	(12.92)
Profit/Loss	Index	(100)	(269.74)	(214.41)	(238.41)	169.74	(20.51)	11.19	26.83

Source: KPPI Verification Results

37. During the 2021-2024 period, domestic sales experienced a downward trend of 12.92%, accompanied by an increase in losses of 26.83%. This was the result of a surge in imports of similar goods, which prevented the Applicant from increasing sales and achieving profits.

38. Based on points 32-37, it can be concluded that during the period 2021-2024, the Applicant experienced **serious losses** based on performance indicators, namely the downward trend in production, domestic sales, productivity, utilized capacity, profit/loss, labor, and accumulation. ending inventory.

Volume Effect Analysis

Table 13. National Consumption, Total Imports, IDN Domestic Sales, Market Share Import Market, and IDN Market Share

No	Description	Unit	Year				Change (%)			Trend (%)
			2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
1.	National Consumption	Index	100	120.38	84.58	91.48	20.38	(29.74)	8.15	(6.01)
2.	IDN Domestic Sales	Index	100	119.27	82.62	89.49	19.27	(30.72)	8.31	(6.76)
3.	Import Amount 4.	Tons	20,873	29,908	26,073	27,631				
							43.28	(12.82)	(0.92)	5.98
										7.30
	IDN Market Share 5. Import	Index	100	99.08	97.68	119.03	97.83	(1.41)	19.03	24.07
										0.15
	Market Share	Index	100	147.68	144.71				(2.01)	14.16

Source: BPS, API, KPPI Verification Results, processed.

39. Based on Table 13 above:

a. During the 2021-2024 period, national consumption experienced a decline with a trend of 6.01%. In 2023, national consumption experienced a significant decline of 29.74% compared to

the previous year, namely from 120.38 index points to 84.58 index points.

- b. The import market share has increased with a trend of 14.16%.
- c. IDN's market share experienced a decline with a trend of 0.80%.
So that IDN's market share was eroded by imported goods in the same year.

B.6.2. Other Factors

40. KPPI also analyzed other factors outside the surge in the number of imported goods that could cause serious losses to the Applicant as follows:

a) Technology

Based on the results of the investigation, the Applicant has technology that is not significantly different from that of manufacturers in other countries in producing the Investigated Goods with spinning speeds between 10,000 rpm and 15,000 rpm. This indicates that the serious losses experienced by the Applicant were not caused by

there are differences in technology.

b) Quality

The quality of the goods produced by the Applicant has met nationally established standards such as SNI 08-0266-1989, SNI 08-0272-1989, and SNI 08-0033-2006. Therefore, the goods produced by the Applicant are able to compete with imported goods in terms of quality because they comply with domestic standards.

c) National Installed Capacity

Table 14. Comparison of Installed Capacity and National Consumption

Description	Unit 2021		2022	2023	2024
National Consumption to National Installed Capacity Source: KPPI	%	39.57	51.14	37.67	41.39

Verification Results, processed.

As seen in Table 14 above, during the 2021-2024 period, it can be seen that national consumption never exceeded the national installed capacity, so that national consumption can be met by IDN.

41. As explained in point 40, there were no other factors that contributed to the serious losses experienced by the Applicant other than the surge in the number of imports of the Investigated Goods.

B.7. Cause-Effect Relationship

42. During the 2021-2024 period, it can be concluded that there was evidence of serious losses experienced by the Applicant due to the surge.

the number of imported goods under investigation and not caused by other factors, which is based on several pieces of evidence, namely:

- a) There was an absolute surge in the number of imports of Investigated Goods with a trend of 7.30%, while the relative surge in the number of imports of Investigated Goods with a trend of 26.70%. b) The import market share

increased with a trend of 14.16%. However, the IDN market share decreased with a trend of 0.80%.

- c) There is a downward trend in production, domestic sales, productivity, installed capacity, used capacity, productivity, workforce, as well as increased financial losses and ending inventory amounts.

- d) According to the explanation in point 41, **there are no** other factors that caused the serious losses experienced by the Applicant **other than the spike in the number of imports** of the Goods Under Investigation.

C. RECOMMENDATIONS

43. Based on the description presented above, KPPI recommends the imposition of Trade Safeguard Measures in the form of Safeguard Import Duty (BMTP) on imports of 27 8-digit HS, **in accordance with the 2022 BTKI**, namely:

Table 15.27 Recommended 8-Digit HS Numbers for Cotton Yarn

Number	HS No.	Number	HS No.
1.	5204.11.10	15.	5205.48.00
2.	5204.19.00	16.	5206.11.00
3.	5204.20.00	17.	5206.12.00
4.	5205.11.00	18.	5206.14.00
5.	5205.12.00	19.	5206.21.00
6.	5205.21.00	20.	5206.23.00
7.	5205.22.00	21.	5206.24.00
8.	5205.24.00	22.	5206.25.00
9.	5205.26.00	23.	5206.31.00
10.	5205.32.00	24.	5206.32.00
11.	5205.41.00	25.	5206.33.00
12.	5205.42.00	26.	5206.42.00
13.	5205.43.00	27.	5206.45.00
14.	5205.47.00		

Source: BTKI 2022

44. In connection with the above, KPPI recommends imposing Safeguard Measures Import Duty (BMTP) for 3 (three) years on imports of "Cotton Yarn" products consisting of 27 8-digit HS Numbers, as follows:

Table 16. Recommendations for Imposing BMTP

Period	BMTP
	<i>Specific Duty</i>
Year I	Rp. 13,419 / Kg
Year II	Rp. 12,614 / Kg
Year III	Rp. 11,809 / Kg

45. In accordance with the provisions of Article 90 PP 34/2011 and Article 9.1 of the *WTO Agreement on Safeguards*, the BMTP in question is subject to imports originating from all countries, except developing countries whose import share does not exceed 3% (three percent), or cumulatively does not exceed 9% (nine percent) of total imports as long as each developing country has an import share of less than 3% (three percent).

Table 17. List of WTO Member Countries Excluded from BMTP

No.	Country	No.	Country
1	Afghanistan	29	Cuba
2	Albania	30	Democratic Republic of the Congo
3	Angola	31	Djibouti
4	Antigua and Barbuda	32	Dominica
5	Argentina	33	Dominican Republic
6	Armenia	34	Ecuador
7	Bahrain, Kingdom of	35	Egypt
8	Bangladesh	36	El Salvador
9	Barbados	37	Eswatini
10	Belize	38	Fiji
11	Benin	39	Gabon
12	Bolivia, Plurinational State of	40	Gambia, The
13	Botswana	41	Georgia
14	Brazil	42	Ghana
15	Brunei Darussalam	43	Grenada
16	Burkina Faso	44	Guatemala
17	Burundi	45	Guinea
18	Cabo Verde	46	Guinea-Bissau
19	Cambodia	47	Guyana
20	Cameroon	48	Haiti
21	Central African Republic	49	Honduras
22	Chad	50	Hong Kong, China
23	Chile	51	Israel
24	Colombia	52	Jamaica
25	Comoros	53	Jordan
26	Congo	54	Kazakhstan
27	Costa Rica	55	Kenya
28	Cote d'Ivoire	56	Korea, Republic of

Country No.	No.	Country
57 Kuwait, the State of	89 Qatar	
58 Kyrgyz Republic	90 Rwanda	
59 Lao People's Democratic Republic	91 Saint Kitts and Nevis	
60 Lesotho	92 Saint Lucia	
61 Liberia	93 Saint Vincent and the Grenadines	
62 Macao, China	94 Samoa	
63 Madagascar	95 Saudi Arabia, Kingdom of	
64 Malawi	96 Senegal	
65 Maldives	97 Seychelles	
66 Mali	98 Sierra Leone	
67 Mauritania	99 Singapore	
68 Mauritius	100 Solomon Islands	
69 Mexico	101 South Africa	
70 Moldova, Republic of	102 Sri Lanka	
71 Mongolia	103 Suriname	
72 Montenegro	104 Tajikistan	
73 Morocco	105 Tanzania	
74 Mozambique	106 Thailand	
75 Myanmar	107 Timor-Leste	
76 Namibia	108 Togo	
77 Nepal	109 Tonga	
78 Nicaragua	110 Trinidad and Tobago	
79 Niger	111 Tunisia	
80 Nigeria	112 Uganda	
81 North Macedonia	113 Ukraine	
82 Oman	114 United Arab Emirates	
83 Pakistan	115 Uruguay	
84 Panama	116 Vanuatu	
85 Papua New Guinea	117 Venezuela, Bolivarian Republic of	
86 Paraguay	118 Yemen	
87 Peru	119 Zambia	
88 Philippines	120 Zimbabwe	

Source: <https://www.tfadatabase.org/en/groupings/lcs-developing-members>

D. STRUCTURAL ADJUSTMENTS

46. The purpose of imposing TPP is so that during the period of imposition the Applicant can make structural adjustments so that when the imposition is carried out
Once the Safeguard Measures are over, the Applicant's products can compete with imported goods.

47. On May 7, 2025, KPPI held a coordination meeting with the Directorate of Textile, Leather and Footwear Industry (ITKAK), the Technical Directorate of Customs, the Trade Policy Agency (BKPerdag), and the Indonesian Textile Association (API) in order to discuss the planned structural adjustment program to be carried out by the Applicant.

48. Based on point 47, it is agreed that the structural adjustments to be made by the Applicant based on the table below are as follows:

Table 18. Realization of Structural Adjustment

No.	Program Plan	Activity plan	Unit	Year		
				First	Second	Third
1.	Product Efficiency	a. Optimizing production through production efficiency; b.	%	3	5	7
		Optimizing production through efficient use of raw materials; and	%	2	4	5
		c. Product diversification. a.	Amount	1	2	3
2.	Labor Productivity Work	Conducting regular training for employees to improve technical and management skills; and	Amount	2	4	6
		b. Increasing the number of employees who participate in training and workforce development.	Amount	10	20	30
3.	Product Quality	a. Reducing the level of product defects; and b.	%	1	2	3
		Increasing product certification. Number of a.	Use of	1	2	3
4.	Technological Changes	machines with automatic technology, software, and/or digitalization; and	Amount	2	3	5
		b. Investment in machinery/	Amount	1	2	3
5.	Post-End Strategy Production	technology. a. Expansion of target market areas; And	%	5	10	15
		b. Promotion and digital marketing to new customers.	Amount	2	4	6

49. The percentage value of implementation can be explained as follows:

a. Increasing production efficiency through:

- Optimization of production through production efficiency;
- Optimization of production through efficient use of raw materials;
- Product diversification

b. Increasing labor productivity, by means of:

- Regular training for employees to improve skills technical and management;
- Increasing the number of employees who participate in training and workforce skills development.

c. Improving product quality, by means of:

- Reduction of product defect rates;
- Addition of product certification.

d. Technological changes/developments, through:

- Use of machines with automation technology, *software*, and/or digitalization;
- Investment in machinery/technology.

e. Improving post-production strategies, by:

- Expansion of target market (local/export); • Promotion and *digital marketing* to new customers.

Jakarta, May 22, 2025

APPENDIX 1

Attachment 1. List of Producers Represented by the Applicant

Company Name 1. PT.	Address
Bitratex Industries	Jl. Taman Curie No.3, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Bandung City, West Java 40171
2. PT. Delta Merlin Sandang Tekstil	Jl. Raya Timur, Kenatan, Bumiaji, Kec. Sragen, Sragen Regency, Central Java 57254 (KM 10)
3. PT. Delta Dunia Sandang Tekstil, Jl. Raya Semarang-	Demak Km.14, Tambakroto, Sayung, Batu Lor, Batu, Kec. Demak, Demak Regency, Java Middle
4. PT. Delta Dunia Tekstil	Jl. Maospati - Solo, Gerdu, Jetis, District Jaten, Karanganyar Regency, Central Java 57731
5. PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil	Jl. H. Fachrudin No. 36, RT.9/RW.5, Petamburan, Tanah Abang District, Central Jakarta City
6. PT. Delta Merlin Dunia Tekstil	Pd. III, Pondok, Grogol District, Sukoharjo Regency, Central Java 57552
7. PT. Damaitex	Jl. Simongan No. 100, Ngemplak Simongan, West Semarang District, Semarang City, Central Java 50148
8. PT. Embee Plumbon	Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Central Jakarta 10220
9. PT. Lotus Indah Textile Industries Jl. Prof. Dr. Sutami	No. 111 B, Sukarasa, Kec. Sukasari, Bandung City, West Java 40153
10. PT. Gokak Indonesia	Jalan Ateng Ilyas No 1 RT 02/08, Kampung Muhara, Citeurep, Bogor 16810, West Java
11. PT. Kewalram Indonesia	Jalan Raya Rancaekek KM 25, Kab. Sumedang, West Java
12. PT. Primayudha Mandirijaya	Hamlet 3, Ngadirojo, Ampel District, Boyolali Regency, Central Java 57352
13. PT. Sariwarna Asli	Jl. Hos Cokroaminoto no. 28 Pucang Sawit, Surakarta, Central Java 57125
14. PT. Sinar Pantja Djaja	Jl. Condrokusumo Raya No. 1, Bongsari, District West Semarang, Semarang City, Java Middle 50148
15. PT. Sri Rejeki Isman, Tbk	Jl. KH. Samanhudi 88, Jetis, Sukoharjo, Solo, Central Java

Source: Applicant

APPENDIX 2

**Attachment 2. Description of HS Number of Goods Submitted for TPP
Investigation Application**

No.	HS No.	Description of Imported Goods based on BTKI 2022	
		Indonesian English	
	5204	Cotton sewing thread, prepared for retail sale or not.	<i>Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale.</i>
1	5204.11.10	--- Unbleached	--- <i>Unbleached</i>
3	5204.20.00	Put up for retail sale -	--- <i>Other</i>
		<i>Put up for retail sale</i>	
	52.05	Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more cotton by weight, not put up for retail sale	<i>Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by weight of cotton, not put up for retail sale</i>
4	5205.11.00	-- Size 714.29 decitex or more (not exceeding metric number 14)	-- <i>Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
5	5205.12.00	-- Size less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding metric number 14 but not exceeding metric number 43) -	-- <i>Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)</i>
6	5205.21.00	-- Size 714.29 decitex or more (not exceeding metric number 14)	-- <i>Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
7	5205.22.00	-- Size less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding metric number 14 but not exceeding metric number 43) -	-- <i>Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)</i>
8	5205.24.00	-- Size less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding metric number 52 but not exceeding metric number 80)	-- <i>Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)</i>
9	5205.26.00	-- Size less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding metric number 80 but not exceeding metric number 94)	-- <i>Measuring less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number)</i>
10	5205.32.00	-- The size of each single yarn is less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding metric number 14 but not exceeding metric number 43 per single yarn)	-- <i>Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
11	5205.41.00	-- Size per single thread 714.29 decitex or more (not exceeding metric number 14 per single thread)	-- <i>Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)</i>

NO SECRET

12 52	05.42.00	-- The size of each single yarn is less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding metric number 14 but not exceeding metric number 43 per single yarn)	-- <i>Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
13 52	05.43.00	-- The size of each single yarn is less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding metric number 43 but not exceeding metric number 52 per single yarn)	-- <i>Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)</i>
14 52	05.47.00	-- The size of each single yarn is less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding metric number 94 but not exceeding metric number 120 per single yarn)	-- <i>Measuring per single yarn less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn)</i>
15 52	05.48.00	-- The size of each single thread is less than 83.33 decitex (exceeding metric number 120 per single thread)	-- <i>Measuring per single yarn less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn)</i>
	52.06	Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85% cotton by weight, not put up for retail sale.	<i>Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85% by weight of cotton, not put up for retail sale.</i>
16 52	06.11.00	-- Size 714.29 decitex or more (not exceeding metric number 14)	-- <i>Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
17 52	06.12.00	-- Size less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding metric number 14 but not exceeding metric number 43)	-- <i>Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)</i>
18 52	06.14.00	-- Size less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding metric number 52 but not exceeding metric number 80)	-- <i>Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)</i>
19 52	06.21.00	-- Size 714.29 decitex or more (not exceeding metric number 14)	-- <i>Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
20 52	06.23.00	-- Size less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding metric number 43 but not exceeding metric number 52)	-- <i>Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)</i>
21 52	06.24.00	-- Size less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding metric number 52 but not exceeding metric number 80)	-- <i>Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)</i>

NO SECRET

22 52	06.25.00	-- Size less than 125 decitex (exceeding metric number 80)	-- <i>Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)</i>
23 52	06.31.00	-- Size per single thread 714.29 decitex or more (not exceeding metric number 14 per single thread)	-- <i>Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)</i>
24 52	06.32.00	-- The size of each single yarn is less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding metric number 14 but not exceeding metric number 43 per single yarn)	-- <i>Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
25 52	06.33.00	-- The size of each single yarn is less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding metric number 43 but not exceeding metric number 52 per single yarn)	-- <i>Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)</i>
26 52	06.42.00	-- The size of each single yarn is less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding metric number 14 but not exceeding metric number 43 per single yarn)	-- <i>Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
27 52	06.45.00	-- The size of each single thread is less than 125 decitex (exceeding metric number 80 per single thread)	-- <i>Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn)</i>

Source: Indonesian Customs Tariff Book (BTKI) 2022